

**ANALISIS PENGARUH PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
102/PMK.011/2011 DAN NOMOR 90/PMK.011/2011 TERHADAP  
KEGIATAN PERFILMAN DI INDONESIA**

**SELVIA ARDI**

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**selvia.ardi@yahoo.com**

***ABSTRACT***

*Taxation issues that occur between the importer's film and the government about royalty tax rate and the amount of import duties. The effect of application of PMK No.102/PMK.011/2011 and PMK No.90/PMK.011/2011 for import film business. The purpose of this study to describe the impact of the implementation of the PMK. Increase in the amount of taxes to be paid by importers of an impact on increasing the cost of the film and also an increase in cinema ticket rates.*

*Keywords: Importer film, Film imports, Tax rate, PMK No.102/PMK.011/2011 and PMK No.90/PMK.011/2011*

**PENDAHULUAN**

**LATAR BELAKANG MASALAH**

Landasan yang sangat penting untuk memahami kebijakan perdagangan salah satunya adalah pemahaman tentang dampak tarif. Tarif juga merupakan bentuk hambatan perdagangan yang paling menonjol secara historis. Namun tidak hanya hambatan saja dampak yang diberikan dengan adanya pemberlakuan tarif, sejumlah manfaatpun juga terdapat didalamnya.

Pengenaan tarif tidak hanya diberlakukan untuk perdagangan dalam negeri saja namun kebijakan tersebut juga diberlakukan untuk perdagangan multinasional. Perdagangan disini tidak hanya terjadi pada perdagangan barang yang memiliki nilai fisik yang jelas (*tangible goods*) namun ada juga barang yang

tidak memiliki fisik (*intangible goods*) tetapi tetap memiliki harga jual. Contoh paling mudah untuk dapat dipahami adalah Lukisan. Misalnya, sebuah lukisan dari seorang pelukis tersohor seperti Affandi akan berharga mahal, tidak peduli apakah lukisan tersebut dilukis di atas kanvas murah atau kanvas mahal. Dari sini bisa terlihat bahwa medium penyimpanan produk tersebut tidak menjadi penentu harga jual akhir barang, karena di sini terdapat unsur “Hak Cipta”

Hal tersebut juga terjadi dalam dunia perdagangan film, medium penyimpanan film bisa bermacam-macam mulai dari yang Standar pemakaian rumah (Super 8mm), Standar bioskop keliling (16mm), Standar Bioskop (35mm) hingga yang termahalpun IMAX (75mm). Semakin besar ukuran film yang dipakai maka akan semakin mahal harga cetak filmnya. Namun demikian nilai Hak Cipta film ini tidaklah berubah di tangan konsumen.

Penelitian kali ini berdasarkan kasus film Hollywood yang tergabung anggota MPA - *Motion Picture of America* (Walt Disney, Paramount, Sony Pictures, 20th Fox Movies, Universal Pictures, dan Warner Bros), yang diimpor oleh beberapa importir film Indonesia seperti *PT Camila Internusa*, *PT Amero Mitra Film* dan *PT Satria Perkasa Esthetika*. Tiga importir ini termasuk distributor lokal terbesar di bidang penyaluran film impor. Film-film keluaran MPA selama ini identik dengan film-film *box office* yang banyak dinanti oleh penggemar film.

Kegiatan ekspor-impor yang dilakukan antara MPA dan Importir film di Indonesia menimbulkan sejumlah polemik perpajakan, salah satu yang berhubungan langsung didalamnya adalah pengenaan bea masuk atas barang

impor. Polemik pajak bea masuk ini berawal dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-03/PJ/2011 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Royalti dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasukan Film Impor pada Januari tahun lalu. Pemerintah menerapkan bea masuk tarif film impor 23,75 persen dari royalti US\$ 43 sen per rol film yang diedarkan. Pada saat yang sama pemerintah menekan pajak produksi film nasional dari 10 persen jadi 0 persen. Aturan itu dianggap memberatkan importir film.

Importir film selama ini hanya membayar bea masuk berdasarkan harga cetak salinan film. Sedangkan bea masuk atas dasar hak royalti dan bagi hasil belum dibayar. Akibatnya timbul kurang bayar atas bea masuk atas hak royalti bagi hasil sejak 1995.

Winbert Hutahaean (2011) menemukan suatu fakta bahwa selama puluhan tahun biaya yang dibayar Hollywood dan importir tersebut hanya mengikuti rumusan memasukkan barang non hak cipta. Artinya komponen hak cipta tersebut tidak dimasukkan walau Hollywood menerima uangnya dari importir. Lebih rinci lagi dapat dijelaskan bahwa ketika Hollywood membawa rol film ke Indonesia, mereka hanya membayar bea masuk pembuatan rol film tersebut (harga fisik rol film), apakah ukuran 35mm atau 16mm. Padahal setelah film itu diputar, Hollywood menerima uang royalti dari importir. Seharusnya uang yang diterima tersebut dikenai pajak oleh pemerintah, yang disebut dengan Pajak Royalti tersebut. Apabila hanya berpatokan pada bea masuk rol film, maka ke depannya Indonesia akan rugi besar. Hal tersebut dikarenakan bahwa di belahan dunia lain banyak bioskop yang sudah beralih ke full digital, di mana medium

penyimpanannya adalah hard disk atau keping disk. Misalnya adalah Hongkong dan Thailand, maka jika Indonesia juga sudah beralih ke bioskop digital, maka Hollywood dan importir hanya dikenai bea masuk keping CD tersebut yang nilainya tidaklah seberapa. Karena itulah, kedepannya dalam era teknologi, kegiatan impor film harus dikenakan Pajak Royalti dan bukan semata menyandarkan pada bea masuk. Tentu, instruksi itu menyangkut seluruh sektor dan aspek kegiatan perdagangan non fisik lainnya.

Versi pengusaha, bea masuk hanya dapat dikenakan pada barang yang berwujud, bukan atas hak *intangible goods*. Karena itu, bea masuk hanya dapat dikenakan atas nilai kopi film. Sedangkan royalti film dikenai pajak royalti. Pengusaha menilai, jika setelah royalti film masih dikenai bea masuk, akan terjadi pungutan berganda (Indonesia Movie Crisis, 8/6/2011)

Beda dengan versi pemerintah, komponen yang harus dibayarkan pengusaha selama ini adalah Bea masuk 10%, Pajak Pertambahan Nilai 10%, dan Pajak Penghasilan 2,5%. Sesuai kesepakatan World Trade Organization (WTO) pun, film yg diimpor harus membayar Bea masuk per copy, Bea Royalti dan Bea bagi hasil. Tiga komponen inilah yang belum pernah dibayarkan. Oleh karenanya pemerintah sendiri meminta tiga importir film untuk membayar separuh dari tunggakan pajak dan denda bea masuk impor senilai Rp 310 miliar (Indonesia Movie Crisis, 8/6/2011)

Biaya royalti juga tidak dimasukkan dalam perhitungan kegiatan impor film namun juga terdapat temuan fakta lain yaitu selama tahun 2008 - 2010 semua importir film tidak bayar pajak, sesuai UU No.17/2006 tentang Kepabeanan. Para

importir itu diberi tenggat waktu untuk melunasi tunggakannya tersebut, fakta ini ditemukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Bambang Brodjonegoro saat melakukan audit pada bulan Januari tahun 2011

Praktek kegiatan impor film yang mana didalamnya terdapat banyak permasalahan. Sehingga Kementerian Keuangan, Dirjen Perpajakan serta Dirjen Bea dan Cukai kembali merumuskan pajak atas impor film yang lebih pasti dan lebih sederhana. Pemerintah juga memastikan bentuk pajak yang baru dirumuskan tersebut mencerminkan hubungan yang sama-sama menguntungkan antara pemerintah dan importir film asing.

## **RUMUSAN MASALAH**

Kegiatan perpajakan yang selama ini sudah terkenal dengan banyak masalah yang timbul didalamnya. Memaksa aparaturnya agar selalu peka dan selalu melakukan pembaharuan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang timbul tersebut. Dimana sejatinya peraturan *rebuilding* tersebut mampu memberikan kontribusi solusi yang diharapkan. Dengan adanya latar belakang masalah yang nampak tersebut maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah *"Bagaimana pengaruh PMK NOMOR 102/PMK.011/2011 dan PMK NOMOR 90/PMK.011/2011 yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan sejak tahun 2011 terhadap kegiatan perfilman di Indonesia?"*

## **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak PMK

No.102/PMK.011/ 2011 dan PMK No.90/PMK.011/2011 dari kronologis polemik yang terjadi dalam usaha film impor serta melihat polemik ini dari dua sisi yang berbeda secara obyektif dan proporsional. Permasalahan yang timbul akibat pengenaan peraturan perpajakan lama dan pelaksanaan peraturan perpajakan *rebuilding* yang sengaja dirumuskan oleh aparaturnegara yang berwenang untuk memberikan solusi dari masalah yang timbul akibat pelaksanaan peraturan perpajakan lama. Dengan berfokus pada pelaksanaan peraturan pajak yang lama maupun baru, tidak hanya dampak positif dan negatif saja yang diperoleh, namun keakuratan informasi dan bukti saja juga tak luput dari tujuan penelitian ini.

## **MANFAAT PENELITIAN**

Saat ini sikap antagonis selalu ditunjukkan oleh pengusaha sebagai wajib pajak dan fiskus selalu menjadi awal mula masalah yang timbul dalam bidang perpajakan. Dengan argumen yang sama-sama membela kepentingan masing-masing memunculkan berbagai anggapan bahwa mereka saling menjatuhkan satu sama lain, dengan kata lain pengusaha memunculkan stigma bahwa peraturan perpajakan kerap “mencekik” bisnis yang mereka kelola sehingga disini banyak wajib pajak (pengusaha) menjalankan praktik curangnya untuk menghindari kewajiban pajaknya. Sama halnya dengan pengusaha, fiskus juga beranggapan bahwa wajib pajak dalam hal ini adalah pengusaha selalu “pintar” dalam membayar kewajibannya namun juga tak jarang ada beberapa oknum dari profesional perpajakan itu sendiri yang membantu para wajib pajak melakukan pemutihan pajak ataupun cara curang lainnya. Karena kedua pihak merasa memiliki kepentingan masing-masing yang dianggapnya penting maka butuh

kesepakatan bersama yang mencerminkan hubungan yang sama-sama menguntungkan antara pemerintah dan wajib pajak (pengusaha) dalam hal ini adalah importir film asing. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bahwa keinginan untuk menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara pengusaha dan fiskus dapat terjalin dengan adanya peraturan perpajakan *rebuilding*. Dengan kata lain pengusaha tidak merasa terbebani akibat tarif pajak yang diberlakukan oleh fiskus, dan fiskus dapat memperoleh pembayaran kewajiban dari wajib pajak sebagai pemenuhan pendapatan pajak negara.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **PERFILMAN**

#### **Definisi**

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2009 tentang perfilman pada pasal 1,

1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan
2. Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film.
3. Kegiatan perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial.
4. Usaha perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.

Kegiatan perdagangan impor film melibatkan banyak pihak yang berhubungan langsung didalamnya, tidak hanya pihak dari dalam negeri saja yang berperan dalam pengimporan dan pendistribusian film ke bioskop-bioskop lokal namun pihak asing yang berkaitan juga turut ambil peranan penting. Pihak-pihak dari dalam negeri yang terlibat langsung diantaranya adalah Importir film dan Dirjen Bea dan Cukai, sedangkan dari pihak asing antara lain adalah pihak MPA (*Motion Picture Association*) ataupun non MPA.

Penikmat film dan sejumlah sineas filmpun tak luput dari keterlibatannya dalam penunjang sekaligus promotor tidak langsung dalam kegiatan perfilman ini. Maka tak perlu disangkal lagi dengan banyaknya pihak yang terjun didalamnya membuat film impor khususnya film-film keluaran MPA selama ini selalu identik dengan film-film *box office* yang banyak dinanti oleh penggemar film

Menurut *the free dictionary*, *box office* adalah “*The amount of money received from ticket sales for an entertainment*” yang memiliki arti “Jumlah uang yang diterima dari penjualan tiket untuk hiburan”. Bahwa setiap diadakan suatu pertunjukan dimana dalam hal ini adalah pemutaran suatu film, tiket yang dijual oleh penyelenggara selalu habis terjual.

## **JENIS MEDIUM PENYIMPANAN FILM**

### **Kamera yang menggunakan pita analog atau pita seluloid**

#### **16mm Camera**

Kamera ini menggunakan pita seluloid yang diagonalnya 16mm. Jenis film



16mm ini dikembangkan oleh Eastman Kodak pada tahun 1923. Tujuannya pada saat itu adalah sebagai alternatif membuat film yang lebih murah dibandingkan dengan film 35mm. Walaupun pada awalnya ditujukan bagi filmmaker amatir, namun ke depannya kamera 16mm menjadi cukup populer di kalangan filmmaker, terutama yang budgetnya cukup ketat. Di Indonesia sendiri, rata-rata iklan dan film yang menggunakan seluloid memakai kamera film 16mm. Variasi lain dari kamera 16mm adalah super 16mm, namun tidak terlalu banyak berbeda. Hanya ukuran diagonal framenya yang sedikit lebih besar.

### **35mm Camera**

Jenis kamera yang sampai saat ini masih menjadi favorit banyak filmmaker (walaupun banyak juga yang sudah beralih ke High Definition). Lagi-lagi, 35 mm diambil dari ukuran diagonal pita seluloidnya. Ukuran pita ini sama dengan pita seluloid yang digunakan pada fotografi. Bedanya, pada kamera foto posisi pita horizontal, sedangkan pada pita kamera film posisi pita vertikal.

Dasar dari kamera ini ditemukan oleh Lumiere bersaudara, sedangkan pita 35mm sendiri ditemukan oleh William Dickson dan Thomas Edison, berdasarkan film stock yang disuplai oleh George Eastman. 35 mm sudah mengalami beberapa modifikasi, dari yang tadinya hitam putih, menjadi bisa menerima warna, dan dari yang tadinya tidak bisa menangkap suara, menjadi bisa menerima sinyal suara.

35mm adalah ukuran standart di dunia film dan beberapa festival besar hanya menerima format akhir berupa 35mm. 35mm juga merupakan standart yang digunakan di bioskop-bioskop, sehingga film dengan hasil akhir 35mm bisa diputar di seluruh dunia. Namun dewasa ini, sudah ada bioskop-bioskop yang bisa

memutar format digital.

Film-film *berbudget* besar masih cenderung memilih kamera 35mm untuk shooting, karena kualitas gambarnya masih belum ada yang mengalahkan. Selain itu juga ada perasaan gengsi tersendiri ketika shooting menggunakan kamera 35mm.

### **Kamera 65mm dan 70mm**

Kedua jenis kamera ini tidak begitu populer karena biaya yang harus dikeluarkan sangatlah mahal. Film yang menggunakan jenis kamera ini biasanya adalah film-film IMAX.

### **Standard 8mm Camera**

Kamera ini dikembangkan pada era Great-Depression oleh Eastman Kodak dan dirilis pada tahun 1932. Tujuan dari dirilisnya jenis kamera ini adalah untuk membuat film rumahan (home movie) yang lebih murah dari 16mm. 8mm mengacu pada jarak diagonal dalam sebuah frame pita seluloid itu. Rata-rata pita seluloid itu bisa merekam antara 3 sampai 4,5 menit, dan bergerak di kecepatan 12, 15, 16, dan 18 frames per second. Kamera ini terhitung sudah cukup langka, namun film seluloidnya sendiri masih diproduksi.

### **Super 8 Camera**

Super 8 camera adalah pengembangan dari kamera 8mm dan dirilis pada tahun 1965. Pada masanya, ini adalah pilihan para filmmaker amatir. Gambar yang dihasilkan sedikit lebih bagus daripada kamera 8mm. Tidak terlalu banyak perbedaan antara kamera 8mm dengan Super 8.

Perbedaan yang mendasar hanya terletak pada ukuran materi yang digunakan. Untuk Super 8, ukuran materi seluloid yang digunakan sedikit lebih besar untuk setiap framenya. Selain itu, ukuran lubang di samping frame pada pita seluloid super 8 jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pita 8mm. Karena bentuknya yang kecil dan ringan, serta pengoperasiannya mudah, kamera 8mm dan kamera super 8 lebih banyak digunakan untuk keperluan shooting rumahan. Pada jamanannya, kamera 8mm dan super 8 meyerupai consumer camcorder di jaman sekarang.

### **Media Penyimpanaan Digital**

Perpaduan kompresi MPEG-2 dan MPEG-4, maka terciptalah format penyimpanan digital yang disimpan dalam media MMC (*Multimedia Card*), CF Card (*Compact Flash Card*), Sony Memory Stick Pro, P2 Card, bahkan *Hard-Disc*. Kamera yang menggunakan media penyimpanan digital ini menjadikan video yang kita rekam sebuah file video yang kemudian akan kita buka menggunakan komputer. Layaknya file video yang kita simpan di USB *flashdisc*, file-file video akan tersimpan di dalam media penyimpanan digital.

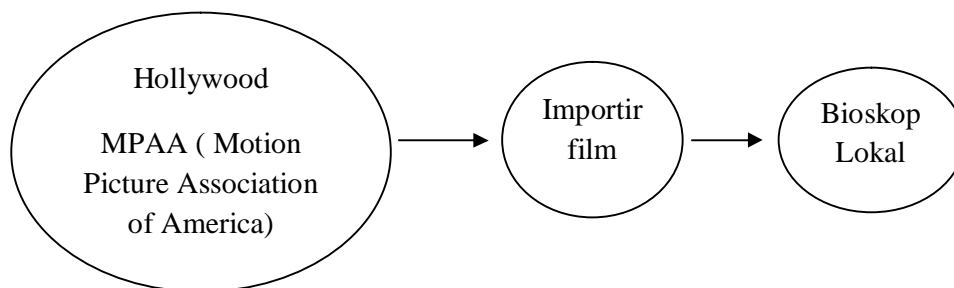
Format Digital Cinema-pun menyerah pada kemampuan pita dalam penangkapan gambar dengan resolusi tinggi dan penyimpanan file berukuran besar. ARRIFLEX D-20 (2048 x 1152, 2K) dan RED One (Red *Technology Inc.* Max. Res. 4096 x 2304, 4K) menggunakan media *Hard-Disc* dan *Compact Flash Card* sebagai *Digital Magazinenya*. Red One dengan ukuran sensor gambar 12 Megapixels CMOS berukuran *Super 35mm "Mysterium"* (lebar sensor 24,4 x 13,7cm) dapat menghasilkan resolusi maksimal 4096 x 2304 dan menghasilkan

kompresi “*RedCode RAW*”. RED Code mampu menghasilkan kompresi *Uncompressed* dengan ukuran file dengan bitrate rendah , yaitu 28MB/st (224 megabits/dt), dan 36 MB/dt (288 megabits/dt). Bentuk dan ukuran kamera RedOne kecil, seukuran *handycam* dan berat kamera (*body only*) 4Kg.

Masuknya ARRIFLEX ke dalam dunia *Digital Cinema* menjadikan cukup banyak pro-kontra oleh para pendukung digital (dalam dunia perfilman) dengan para pendukung film analog. Film yang dikatakan memiliki ciri khas khusus dalam mereproduksi gambar dianggap tidak dapat digantikan oleh video. Sementara para produsen kamera video yang bersolusi tinggi tidak mau produknya disebut sebagai Hi-Res Video (video beresolusi tinggi), tetapi mereka menyebut dirinya *Digital Cinema*, walau pada kenyataannya memang prosesnya merupakan video beresolusi tinggi.

## PROSES PENDISTRIBUSIAN FILM IMPOR

Berikut ini adalah bagan proses pendistribusian film asing dari impor film hingga tayang di bioskop.



**Gambar 1. Proses pendistribusian film asing**

## **IMPORTIR FILM**

Berdasarkan PMK No 102/PMK.011/2011, Importir adalah pelaku usaha perfilman yang melakukan usaha impor film dan/atau pengedaran film.

Importir film yang mengimpor film baik dari MPA maupun non MPA, antara lain sebagai berikut :

**PT Camila Internusa Film** Salah satu distributor tertua di Indonesia. Mendatangkan film-film Hollywood keluaran Sony/Columbia, Universal, dan Paramount

**PT Satrya Perkasa Esthetika Film merupakan** Distributor film Hollywood juga. Mendatangkan film keluaran 20th Century Fox, Disney, dan Warner Bros

**PT Amero Mitra Film** Distributor film Hollywood juga, namun bukan dari studio big six milik MPAA (*Motion Picture Association of America*), melainkan studio yang relatif kecil seperti: The Weinstein Company, Lionsgate, Screen Gems, Summit, dan CBS.

**Jive Entertainment** Distributor ini kebanyakan mendatangkan film-film non Hollywood, seperti film-film dari Thailand, Perancis, Norwegia, dan lain-lain

**PT Parkit Film** Kebanyakan mendatangkan film dari Bollywood dan beberapa film keluaran studio indie Hollywood.

**PT Teguh Bakti Mandiri** Distributor ini spesialisasi di perfilman mandarin.

**PT Rapi Films** Distributor ini terkenal sebagai Production House yang membuat banyak sinetron dan film bioskop lokal, namun ternyata mereka juga mengimpor beberapa film asing.

Importir merupakan wajib pajak yang juga harus melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya. Adapun hak dan kewajiban wajib pajak berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

Kewajiban Wajib pajak :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT ( SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
6. Jika diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksa.

Hak Wajib Pajak :

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pembukuan SPT.
3. Melakakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam sSurat Ketetapan Pajak
7. Meminta Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang salah.
9. Memeberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding.

#### **ATURAN IMPOR FILM BERTUMPU PADA UNDANG-UNDANG**

Peraturan yang dirumuskan oleh pemerintah sedikit banyak mempengaruhi sejumlah pihak yang berkaitan didalamnya. Perubahan-perubahan yang dilakukan yang sejatinya untuk memberikan peraturan yang lebih jelas malah dirasa membuat sejumlah pihak dirugikan. Misalnya dengan adanya pembaharuan mengenai tarif pajak impor film.

Menurut Drs. Sabri (2008) tarif adalah pengenaan besarnya pajak yang

dikenakan kepada wajib pajak. Tarif pajak yang digunakan untuk impor film mulanya adalah tarif *ad valorem* Yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor. Pengertian ini berdasarkan PMK No 90/PMK.011/2011. Untuk perlu diketahui Sebagian besar negara di belahan benua Eropa memakai jenis tarif ini.

Jenis tarif ini dirasa merugikan pemasukan Negara, sehingga tarif *ad valorem* diubah menjadi tarif spesifik, yaitu pajak yang dikenakan sebagai beban tetap unit barang yang diimpor. Berdasarkan faktor perubahan sebelum PMK No 90/PMK.011/2011. Amerika Serikat menggunakan tarif ini dengan porsi yang sama besar dengan pajak *ad valorem*. Dalam PMK tersebut pemerintah sepakat untuk mengubah jenis tarif film impor dari tarif *ad valorem* ke tarif spesifik. Tarif “*ad valorem*” adalah pajak berdasarkan persentase terhadap nilai pabean, sedangkan tarif spesifik ditentukan dengan satuan nilai barang. Selain PMK No 90/PMK.011/2011, ada peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur tentang kegiatan impor film, antara lain adalah:

1. UU No 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari UU No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan tambahan dari PER/33/2009

#### Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.
- (2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan



penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:

- a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau
- b. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar.

2. WTO (*World Trade Organization*) *Valuation Agreement* yang sudah diratifikasi

WTO disini merupakan jenis tax treaty, yang mana memiliki pengertian menurut John Hutagaol (2000) adalah perjanjian perpajakan bilateral yang mengatur pembagian hak penolakan dari masing-masing negara dengan maksud untuk mencegah timbulnya pengenaan pajak berganda. Dalam praktiknya, penghindaran pajak berganda dapat dilakukan dengan cara membatasi wewenang pemajakan dari negara sumber atas penghasilan yang timbul dari wilayah yuridiksinya.

3. PMK No160 Tahun 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk  
Pasal 5 ayat 1

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar oleh Pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar

Pasal 5 ayat 3 c

“Biaya-biaya dan/atau nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa (salah satunya) yaitu royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang dinilai, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.

4. PMK No.102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita.

Penjelasan atas pasal 2

“Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor, terutang PPN dengan DPP Nilai Lain. Nilai lain tersebut telah memperhitungkan nilai dari media Film Cerita Impor, berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor. PPN atas pemanfaatan Film Cerita Impor tersebut dipungut dan dibayar pada saat impor.”

5. PMK No.90/PMK.011/2011 tentang Penetapan sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.

## **PEMBAHASAN**

Masalah perpajakan tentang pengimporan film asing sudah menemukan jalan keluarnya, SK Menteri Keuangan telah disahkan dan sudah diberlakukan sejak juli tahun 2011 lalu. PMK No 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita, menjadi acuan bagi importir film dalam membayar bea masuk atas transaksi pengimporan film, namun tidak hanya itu juga Menteri Keuangan juga telah mengotorisasi PMK yang lain yaitu PMK No 90/PMK.011/2011 tentang Penetapan sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Dengan adanya kedua PMK *rebuilding* ini para pengusaha bioskop bisa bernafas lega menyusul peraturan tersebut diharapkan mampu menyelesaikan kisruh aturan pajak film yang membuat film Motion Picture Association (MPA) Amerika Serikat menolak mengizinkan filmnya tayang di semua bioskop tanah air.

PMK yang dikeluarkan 13 Juli 2011 tersebut, mengubah hitungan bea masuk film impor. Sebelumnya, bea masuk film impor dihitung berdasarkan panjang film seluloid. Sekarang, bea masuk dihitung berdasarkan durasi tayang film. Menurut Lisabona Rahman (2011), perhitungan sebenarnya mengenai bea yang dikenakan kepada importir naik hampir 100% hingga bea masuknya menyamai tarif masuk film ke Thailand. Namun, hitung-hitungan ini dinilai cukup baik. Dengan adanya pemberlakuan kedua PMK tersebut banyak pihak yang terkena dampaknya.

Besarnya bea masuk yang ditetapkan pada PMK No 102/PMK.011/2011 dan PMK No 90/PMK.011/2011 mau tidak mau harus dipatuhi para importir film dan pihak MPA agar film impor dapat didistribusikan ke bioskop-bioskop tanah air. Dilihat dari besar tarif yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan pada PMK baru tersebut memang sangat beda jauh dengan tarif lama. Dampak langsung yang

dapat dirasakan dari tarif baru ini dirasa para importir sangat tinggi yang mana akan berimbas pada harga perolehan dari film itu sendiri yang nantinya berimbas juga untuk penikmat film dengan naiknya harga tiket masuk bioskop.

Menurut JB Kristanto dan Adrian Jonathan Pasharibu (2011), Film-film MPA mulai akhir Oktober tahun lalu mulai menyediakan data pendapatan kotoranya, sebagaimana umumnya diberitakan oleh situs di internet, koran, maupun majalah bisnis perfilman. Kesulitannya untuk Indonesia adalah dengan ketidaktersediaan data-data demikian, Memang belum terlihat adanya usaha penertiban hukum (*law enforcement*) dari pemerintah terkait dengan ketersediaan data penonton atau data pendapatan kotor di ranah publik. Padahal, tertulis jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Perfilman tahun 2009 bahwa pelaku usaha pertunjukan film "wajib memberitahukan kepada Menteri secara berkala jumlah penonton setiap judul film yang dipertunjukkan. Ayat kedua secara eksplisit menjelaskan hak masyarakat atas data penonton: "Menteri wajib mengumumkan kepada masyarakat secara berkala jumlah penonton setiap judul film yang dipertunjukkan di bioskop". Sementara situs *FilmIndonesia* hanya bisa memperoleh data jumlah penonton dan ditambahkan dengan data pendapatan kotor khusus Indonesia dari situs *Mojo* yang dicoba dikonversikan ke jumlah tiket atau penonton dengan mengambil rata-rata harga tiket. Seperti diketahui, harga tiket bioskop di Indonesia (21 dan Blitz) berkisar antara Rp. 20.000 sampai Rp. 100.000. Diketahui juga bahwa Kelompok 21 sekarang ini membagi bioskopnya dalam tiga tingkatan yaitu 21, XXI, dan Premier. Perbedaan kelas itu menunjukkan perbedaan harga tiket sebagai berikut:

21 : Rp 20.000 – Rp 25.000

XXI : Rp. 25.000 / Rp.30.000 - Rp.35.000 / Rp.50.000

Premier : Rp. 50.000 – Rp. 100.000

Kesulitan mengakses data penonton menghadirkan sejumlah konsekuensi. Jumlah total penonton bioskop setiap tahunnya adalah perkiraan. Itupun dilakukan secara independen dari sumber data alternatif. Pemetaan yang mendetail terhadap siapa saja dan bagaimana pola konsumsi penonton bioskop di Indonesia juga jadi sulit untuk dilakukan.

Dengan tidak dibukanya data penonton, penggiat sinema Indonesia kehilangan informasi vital terkait hajat hidupnya. Keterlibatan publik dalam mengamati (dan mengawasi) kegiatan pelaku bisnis bioskop pun jadi terbatas. Apabila masa edar suatu film ditentukan dari hold over figure (jumlah minimum penonton), berarti harus ada keterbukaan pada publik perihal data penonton. Bioskop tidak pernah mempublikasikan informasi tersebut. Bioskop juga tidak pernah mengumumkan maupun menjelaskan berapa hold over figure yang berlaku secara tertulis, hingga bisa jadi pegangan siapapun. Alhasil, bioskop punya kebebasan yang tak terkontrol dalam menjalankan operasi bisnisnya.

Perbandingannya jumlah XXI dan Premier terdiri dari 248 layar atau hampir sepertiga dari seluruh jumlah layar yaitu 592 layar. Dengan memperhitungkan juga kebijakan "nonton hemat" dari Senin sampai Kamis, maka dapat diambil rata-rata harga tiket untuk film impor adalah Rp 30.000.

Hasil pengkonversian itu menunjukkan bahwa penonton film MPA tahun ini tidak terlalu cemerlang. Rata-rata berpuncak di kisaran 700 sampai 900 ribu

penonton. Dan juga perlu diperhatikan juga lama masa tayang film-film itu yang berkisar dua sampai tiga bulan atau lebih.

Hal tersebut bisa terjadi karena pola pembangunan bioskop sekarang, yang umumnya berprinsip "satu mall satu bioskop", memposisikan penonton film Indonesia di kantong yang sama dengan penonton film impor kelas menengah keatas. Dengan adanya pemberlakuan PMK yang dapat menaikkan harga perolehan film, namun film impor masih menjadi magnet agar penonton ke bioskop, Padahal, kasus pajak yang diributkan di awal tahun, sampai sekarang belum jelas penyelesaiannya.

Peningkatan tarif tiket masuk sebenarnya tidak hanya menguntungkan pihak pengusaha saja namun juga menguntungkan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan penjualan tiket masuk bioskop juga dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 15% dari seluruh penjualan tiket masuk bioskop. Meskipun dalam prakteknya industri perfilman tidak memiliki peranan vital sebagai penunjang pendapatan Negara.

## **SIMPULAN**

Peraturan Pemerintah yang tertuang pada PMK No.102/PMK.011/ 2011 dan PMK No.90/PMK.011/2011 memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam kegiatan perfilman di Indonesia. Hal ini berdasarkan tarif baru yang dinilai memiliki tarif yang lebih tinggi, namun hal tersebut tidak menyurutkan para importir film untuk menjalankan kegiatan pengimporan film akibat pemberlakuan PMK tersebut. Dengan tarif baru itu para importir film harus membayar biaya perolehan dengan harga tinggi. Meskipun harga perolehan dari kegiatan pengimporan film ini tergolong tinggi, namun permintaan dari pengusaha bioskop

tidak menurun karena film impor masih tetap menjadi magnet bagi para penikmat film bioskop di Indonesia.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil analisis pembahasan, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Diharapkan dengan adanya pemberlakuan PMK No.102/PMK.011/2011 dan PMK No.90/PMK.011/2011 para pengusaha bioskop dapat mengukur tingkat profitabilitas dari penjualan tiket masuk bioskop yang terjual.
2. Diharapkan para importir film melaksanakan kewajibanya dengan benar karena PMK No.102/PMK.011/2011 dan PMK No.90/PMK.011/2011 yang dibuat pemerintah telah dianggap menguntungkan keduaabelah pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, 2011, Digital Storage, viewed 4 August 2012,<<http://tentangvideo.wordpress.com/2009/10/12/e-media-penyimpanan-digital-digital-storage/>>
- Hutagaol, John, 2000, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan Negara-Negara di Kawasan Eropa, Salemba Empat, Jakarta
- Hutahaean,Winbert, 2011, Dalam kaitan film Hollywood, mengapa Pajak Royalty itu perlu?,< <http://hiburan.kompasiana.com/film/2011/03/01/dalam-kaitan-film-hollywood-mengapa-pajak-royalty-itu-perlu/>>
- Jonathan Pasaribu, Adrian and Lisabona Rahman 2011, Kronologi Kasus Tarif Impor Film 2011, viewed 4 August 2012,< <http://filmindonesia.or.id/article/kronologi-kasus-tarif-impor-film-2011#.UB4SwoGdahw>>
- Kristanto,JB and Adrian Jonathan Pasaribu 2011, Catatan 2012: Menonton Penonton, viewed 4 August 2012,< <http://filmindonesia.or.id/article/catatan-2011-menonton-penonton#.UB4TqoGdahw>>
- Rahman, Lisabona 2011, Apa Kabar Film Impor?, viewed 4 August 2012,<

<http://filmindonesia.or.id/article/apa-kabar-film-impor#.UB4QvIGdahw>>

Rahman, Lisabona 2011, Film MPA segera kembali? Tunggu..., viewed 4 August 2012, < <http://filmindonesia.or.id/article/kronologi-kasus-tarif-impor-film-2011#.UB4SwoGdahw>

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan perubahan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita.

Republik Indonesia, Nomor 90/PMK.011/2011 tentang Penetapan sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang impor.

Rosita, Maria 2011, Importir Banyak Pasokan Film Lancar, viewed 4 August 2012, < <http://industri.kontan.co.id/news/importir-banyak-pasokan-film-impor-lancar>>